

POLITISASI AGAMA DI PEMILIHAN PRESIDEN 2024 (STUDI KASUS KORPUS BAHASA DAN POLITIK DI PROVINSI JAWA BARAT, INDONESIA)

Polization of Religion in The 2024 Presidential Election (Case Study of Language and Politics Corpus in West Java Province, Indonesia)

Hasanul Bulqiyah¹, Seviyenti Fikroh¹

¹ Universitas PGRI Ronggolawe

Pos-el: hasanulbulqiyah@unirow.ac.id

Abstrak

Pemilihan presiden salah satu esensi dari demokrasi di Indonesia, pelibatan masyarakat dalam pemilu sebagai hak pilih menjadi peluang bagi kelompok kepentingan untuk memenangkan kandidat tertentu di kontestasi pelaksanaan pemilihan presiden. Politisasi agama menjadi bagian dari politik praktis untuk mendapat suara di pemilu. Adanya politisasi agama memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan bangsa dan negara yang memiliki pluralitas cukup tinggi. Selain itu teks yang tersebar pada media yang berkaitan dengan politisasi agama pada pemilihan presiden juga mempengaruhi wacana dalam memilih. Tujuan penelitian ini untuk mengulas politisasi agama yang dibuat berdasar telaah korpus yang disusun dari teks berita daring dan cuitan di media sosial serta mengetahui motif lain dari politisasi agama yang dilakukan oleh sebagian tokoh dan ulama dalam pemilu. Metode kualitatif studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi politisasi agama di Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2024, melalui observasi digital, korpus, wawancara, dan juga dokumentasi yang dilakukan pada berita daring dan cuitan di X serta Forum Lembaga Dakwah dan Ormas Islam, dan Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korpus yang paling muncul pada pemilihan presiden 2024 yang diambil dari berita daring dengan tingkat frekuensi paling tinggi yakni kata-kata seperti "Capres," "Prabowo," "Anies," "Islam," "Pemilih," dan "Ulama". Hasil lain menunjukkan bahwa agama dijadikan alat untuk kegiatan pemilihan presiden 2024 di Provinsi Jawa Barat. Dampak yang sangat krusial di tengah masyarakat dengan adanya persoalan ini, terjadinya perbedaan persepsi yang bisa menimbulkan kegaduhan, ketidakrukunan antar saudara dan lain sebagainya yang dapat merugikan masyarakat.

Kata-kata kunci: agama; korpus; pemilihan presiden; politisasi

Abstract

The presidential election is one of the essences of democracy in Indonesia, the involvement of the community in the election as a right to vote is an opportunity for interest groups to win certain candidates in the presidential election contest. Politicization of religion becomes part of practical politics to get votes in elections. The politicization of religion has a negative impact on the sustainability of a nation and state that has quite high plurality. In addition, texts spread in the media relating to the politicization of religion in the presidential election also influence the discourse in choosing. The purpose of this study is to review the politicization of religion based on a corpus study compiled from online news texts and tweets on social media and to find out other motives for the politicization of religion carried out by some figures and clerics in the election. The qualitative case study method is used in this study to explore the politicization of religion in West Java Province in the 2024 election, through digital observation, corpus, interviews, and also documentation conducted on online news and tweets on X as well as the Islamic Propagation Institution and Islamic Mass Organization Forum, and the Indonesian Ulema Council in West Java Province. The results of the study show that the corpus that appears most in the 2024 presidential election taken from online news

with the highest frequency levels are words such as "Presidential Candidate," "Prabowo," "Anies," "Islam," "Voters," and "Ulama". Other results show that religion is used as a tool in the 2024 presidential election activities in West Java Province. The very crucial impact in society with this problem is the occurrence of differences in perception which can cause chaos, disharmony between siblings and so on which can harm society itself.

Keywords: religion; corpus; presidential election; politicization

Informasi Artikel

Naskah Diterima 9 Oktober 2020	Naskah Direvisi 23 November 2022	Naskah Disetujui 25 Mei 2023
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Cara Mengutip

Efendi, Agik Nur. 2023. Membangun Wacana `Perdamaian` di Era Pandemi Covid-19: Analisis Wacana Positif Tuturan Joko Widodo. *Aksara*. 35(1). 1—16. [doi: http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v35i1.691.1--16](http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v35i1.691.1--16)

PENDAHULUAN

Pegelaran pemilihan umum di Indonesia tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangan sejarahnya, kontestasi pemilihan presiden diwarnai persaingan yang cukup ketat. Berbagai macam bentuk dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden dari setiap kubu terus disuarakan. Indonesia memiliki masyarakat dengan keberagaman latar belakang yang berbeda dan pluralitas agama yang dipengaruhi oleh keadaan geografis (Nurhayati and Agustina, 2020). Perbedaan ini menjadi keuntungan bagi yang menggunakan strategi politik identitas dalam pemilu. Secara umum politik identitas merupakan kegiatan representasi politik pada suatu golongan tertentu seperti agama atau etnis.

Politik identitas di Indonesia bermuatan pada etnisitas, agama, dan ideologi politik. Permasalahan sosial politik yang kompleks di daerah memunculkan organisasi yang di bentuk seperti RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Merdeka Aceh), dan GPM (Gerakan Papua Merdeka) sebagai bentuk perlawanan karena politik sentralistik Jakarta yang sangat tidak adil. Gerakan DI (Darul Islam) di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan menggunakan agama sebagai payung ideologi politik identitas mereka (Maarif, 2012). Terlepas dari sejarah mengenai organisasi-organisasi yang dibentuk tersebut, adanya politik identitas nyatanya mampu melemahkan hakikat demokrasi di setiap pemilu.

Dalam satu dasawarsa politisasi agama menjadi kuat dan salah satu cara tercepat untuk mendapatkan suara, baik dalam kompetisi politik maupun mengenai alasan legitimasi faham keagamaan dari suatu kelompok (Masykuri Abdillah, 2018). Politisasi agama adalah sebuah penggunaan bentuk di dalam agama untuk tujuan politik praktis kekuasaan, yang terdapat norma, doktrin, ajaran, prinsip, teks, diskurus, dan simbol-simbol di dalam keagamaan yang sifatnya hanya sebagai alat dalam politik (Qurtuby, 2018). Secara sederhana, agama digunakan dan dimanipulasi serta dieksploitasi untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu yang sifatnya mencari dukungan sebanyak-banyaknya melalui umat agama tersebut.

Pada era digital seperti sekarang ini, tak sedikit di temukan kampanye dalam bentuk politisasi agama yang tersebar pada platform WhatsApp Group, Youtube, Instagram maupun Tik Tok dan Facebook hingga X. Penerapan politisasi agama tidak cukup baik jika diterapkan di negara yang memiliki beragam budaya, suku, agama, seperti di Indonesia (Novrizaldi, 2022). Adanya politik yang mengatasmakan agama dapat menciptakan polarisasi yang terkesan buruk dan menimbulkan perpecahan karena didasari atas perbedaan politik (Hamid et al., 2023). Pada momentum seperti pemilu, politisasi agama menjadi kekuatan dalam mendapatkan sumber suara dalam pemenangan. Namun hal ini lebih mengarah pada kekuatan yang memiliki dampak negatif. Seperti disintegrasi

bangsa, konflik antar umat beragama, dan melemahkan demokrasi karena mengarah pada politik identitas, serta mengecilkan peran agama (Uswah Sahal, 2024).

Teks yang tersebar di media sosial menjadi bukti sah adanya politisasi agama di pemilihan presiden 2024. Penelitian ini berupaya menunjukkan bukti identifikasinya dengan pendekatan linguistik korpus dan politik. Penelitian ini mengumpulkan teks berita daring dan cuitan di X dari periode 1 Januari sampai dengan 14 Februari 2024 yang berkaitan dengan pilpres sebagai sebuah korpus yang akan ditinjau kecenderungan wacana yang muncul.

Lokus Jawa Barat dipilih dengan berbagai alasan. Pertama, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Hal ini membuat Jawa Barat menjadi sampel besar untuk populasi Indonesia. Kedua, Jawa Barat menjadi satu dari lima kota paling intoleran di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah yang rawan politisasi agama. Ketiga, konsentrasi homogenitas satu agama yang tinggi di Jawa Barat. Dominasi satu agama membuat kecenderungan para pelaku politik untuk menggaet suara dari pemeluk agama tersebut. Hal ini ditengarai mampu menjadi pemantik dari penggunaan politisasi agama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Williamson et al., 2023) berangkat dari keingintahuan politisasi agama pada Islam di Timur Tengah, karena melihat keterlibatan politik para tokoh agama Kristen yang mampu melemahkan pengaruh sosial agama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh agama Islam yang memiliki hubungan dengan posisi politik atau berafiliasi dengan gerakan keagamaan yang aktif secara politik di pandang kurang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam keagamaan, dibandingkan dengan ulama yang secara substansial memang menjadi seorang politikus atau pendukung pemerintah. Dalam penelitian ini juga ditemukan dukungan terhadap ulama yang menempati politik praktis, menganggap wibawa dalam agamanya tidak ada.

Selanjutnya, penelitian dari (Djupe and Neiheisel, 2022) menitikberatkan bahwa dalam praktik politik juga ada peran komunikasi keagamaan. Pendekatan komunikasi keagamaan sangat penting untuk memahami keterlibatan agama dalam politik. Sejalan dengan ini, penelitian dari (Kurniawan, 2018), mengenai politisasi agama pada isu Gerakan Ganti Presiden 2019 juga dibenturkan dengan agama, di mana isu tersebut disinyalir terdapat informasi perasaan dan opini lebih banyak memengaruhi wacana politik publik ketimbang fakta objektif .

Perbedaan penelitian ini yakni fokus pembahasan pada fatwa Ulama sebagian di Provinsi Jawa Barat dengan tegas mewajibkan umat Islam untuk mendukung pasangan calon presiden tertentu. Tentu ini intervensi yang akan menimbulkan konflik dalam satu golongan. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui motif lain dari politisasi agama yang dilakukan oleh sebagian tokoh dan ulama dalam pemilu.

Dari sudut pandang linguistik korpus, metode ini disandingkan dengan ilmu politik untuk melihat kecenderungan dari suatu wacana tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Zetterholm (2010) dengan artikel berjudul *A linguistic corpus-driven approach to American domestic politics*. Artikel ini adalah sebuah penelitian tentang pendekatan analisis korpus bahasa dalam memahami wacana politik domestik di Amerika Serikat, dengan fokus pada bagaimana ideologi politik seperti liberalisme dan konservatisme diperlakukan dalam media massa Amerika. Penelitian ini menggunakan data dari korpus linguistik, khususnya korpus dari *Corpus of Contemporary American English (COCA)* dan majalah *TIME*, untuk menganalisis bagaimana konsep-konsep politik disampaikan dalam artikel media sesuai dengan partai politik yang sedang berkuasa (Demokrat atau Republik).

Lebih lanjut, Pathomchaiwat (2021) juga menulis artikel berjudul *A Corpus-Driven Analysis for Political Discourse Analysis*. Artikel ini fokus pada analisis wacana politik melalui pendekatan korpus bahasa (*corpus-driven analysis*), khususnya dalam menganalisis pidato-pidato presiden Amerika Serikat di abad ke-21. Penelitian ini membahas pidato pelantikan dari tiga presiden AS, yaitu

Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden, untuk menjawab dua pertanyaan utama: fitur bahasa apa yang muncul dalam wacana politik tersebut, dan jenis kekuasaan yang tercermin dari pidato-pidato itu.

Dua riset yang disebutkan di atas dengan riset ini sama-sama menelaah aspek politik dengan bantuan teks berbasis korpus. Perbedaan mendasar ada pada lokus besarnya. Dua artikel di atas berfokus pada politik Amerika, sedangkan artikel ini berfokus pada politik nasional. Isu yang diangkat pun berbeda. Dua artikel di atas mengangkat isu implementasi ideologi-ideologi Amerika, sedangkan penelitian mengetengahkan isu politisasi agama.

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengulas politisasi agama yang terjadi di Jawa Barat terkait Pilpres 2024. Ulasan yang dibuat berdasar telaah korpus yang disusun dari teks berita daring dan cuitan di media sosial. Telaah korpus tersebut dihubungkan dengan teori politik untuk membentuk konstruksi wacana yang utuh terkait fenomena yang terjadi.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif studi kasus (Nasution, 2023). Metode ini di pilih untuk mengeksplorasi dan memahami makna (Kusumastuti and Khoiron, 2019). Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin menyajikan gambaran penelitian yang menyeluruh dan bangunan data yang kompleks (Rose et al., 2020).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi digital, korpus, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digital dilakukan untuk mengamati sumber data berupa portal berita daring dan lini masa media sosial. Data yang sudah diobservasi kemudian dikumpulkan menjadi sebuah korpus dengan bantuan aplikasi Antconc. Pengumpulan data lewat wawancara dan dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh kedalaman topik dari beberapa informan atau dokumen tertulis yang telah dipilih.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis korpus (Rose, 2020) dan analisis model interaksi yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (Miles et al., 2014). Analisis korpus dibutuhkan untuk melihat daftar kata yang paling sering muncul beserta kolokasinya. Model interaksi yang di maksud terdapat empat tahapan. Tahap pertama pengumpulan data, dimana data dikumpulkan sebelum penelitian, saat penelitian bahkan di akhir penelitian. Tahap kedua kondensasi data, pada tahap ini merupakan proses memilih, memfokuskan, atau mentransformasi data yang telah peneliti peroleh waktu penelitian di Jawa Barat baik data wawancara terhadap subjek penelitian atau dokumen-dokumen empiris lainnya. Tahap ketiga display data, pada tahapan ini yakni mengolah data dengan menggabungkan data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi di tulis ke dalam satu matriks kategorisasi sesuai tema yang seragam. Keempat, tahap kesimpulan atau verifikasi. Pada tahapan ini merupakan uraian dari seluruh hasil penelitian, kesimpulan hasil penelitian diverifikasi kembali dan ditinjau secara ulang supaya data yang disampaikan dalam penulisan penelitian tetap terjaga kevalidannya.

Pada penelitian ini juga menggunakan keabsahan data secara benar, maka diperlukan teknik memeriksa kevalidannya yang berdasarkan beberapa kriteria yakni uji kredibilitas, yang dilakukan dengan berbagai tahapan seperti pengamatan terhadap penelitian, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif serta membercheck. Selanjutnya kriteria pengujian transferbility, kriteria pengujian depenability, dan kriteria pengujian konfirmability (Podesva, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daftar kata Frekuentif

Penelitian ini melakukan observasi dalam kurun waktu 1 Januari—14 Februari 2024. Dalam media tersebut terkumpul 462 berita daring dengan kata kunci pilpres, agama, dan Jawa Barat. Selain itu, tekumpul 12.432 token dari cuitan di aplikasi media sosial X dengan kata kunci yang sama. Data tersebut kemudian disatukan dalam satu korpus. Peneliti berupaya mengetahui kata apa yang paling sering muncul terkait topik politik, agama, dan Jawa Barat. Peneliti terlebih dahulu menyisihkan kata hubung, kata sandang, dan interjeksi yang kemungkinan memiliki frekuensi tinggi untuk muncul. Hal ini dilakukan agar daftar kata yang disusun benar-benar menjadi refleksi dari topik yang tengah diteliti. Adapun daftar kata berikut adalah sebagai berikut.

Word List

No	Kata	Frekuensi Kemunculan
1	Capres	374
2	Prabowo	345
3	Islam	302
4	Pemilih	287
5	Kampanye	277
6	Partai	275
7	Anies	268
8	Politik	214
9	Ulama	187
10	Sentimen	185
11	Pesantren	166
12	Koalisi	143
13	Maju	121
14	Identitas	98
15	Cawapres	96

Dalam konteks Pemilihan Presiden 2024, politisasi agama menjadi fenomena yang menarik perhatian, terutama di daerah dengan mayoritas Muslim seperti Jawa Barat. Melalui korpus bahasa yang diambil dari berita daring, kata-kata seperti "Capres," "Prabowo," "Anies," "Islam," "Pemilih," dan "Ulama" muncul dengan frekuensi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan presiden kali ini tidak hanya berpusat pada isu politik biasa, tetapi juga menyentuh aspek-aspek religius yang dipolitisasi. Para kandidat, khususnya yang memiliki basis dukungan di Jawa Barat, tampak menggunakan identitas agama sebagai bagian dari strategi untuk menarik pemilih.

Kehadiran nama capres seperti Prabowo dan Anies dalam korpus, ini menunjukkan fokus masyarakat pada figur tertentu dianggap mewakili nilai atau identitas tertentu, termasuk agama. Figur capres yang sering diberitakan dan dikaitkan dengan isu agama menunjukkan bagaimana politik identitas berbasis agama dapat mempengaruhi pandangan pemilih di Jawa Barat. Para capres bukan hanya tampil sebagai calon pemimpin nasional, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai yang diharapkan dapat membawa perubahan, seringkali dengan narasi yang mengaitkan kepercayaan keagamaan dengan visi kepemimpinan mereka.

Dalam hal ini, Islam muncul sebagai agama yang paling banyak disinggung, terutama melalui keterlibatan ulama dan lembaga seperti pesantren dalam politik praktis. Keterlibatan ulama di arena

politik mengisyaratkan adanya pengaruh besar agama Islam dalam membentuk opini politik di masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Barat juga memainkan peran signifikan dalam menyuarakan pilihan politik, di mana masyarakat cenderung mempercayai rekomendasi yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama. Politisasi agama dalam hal ini semakin kuat dengan adanya dukungan dari tokoh dan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

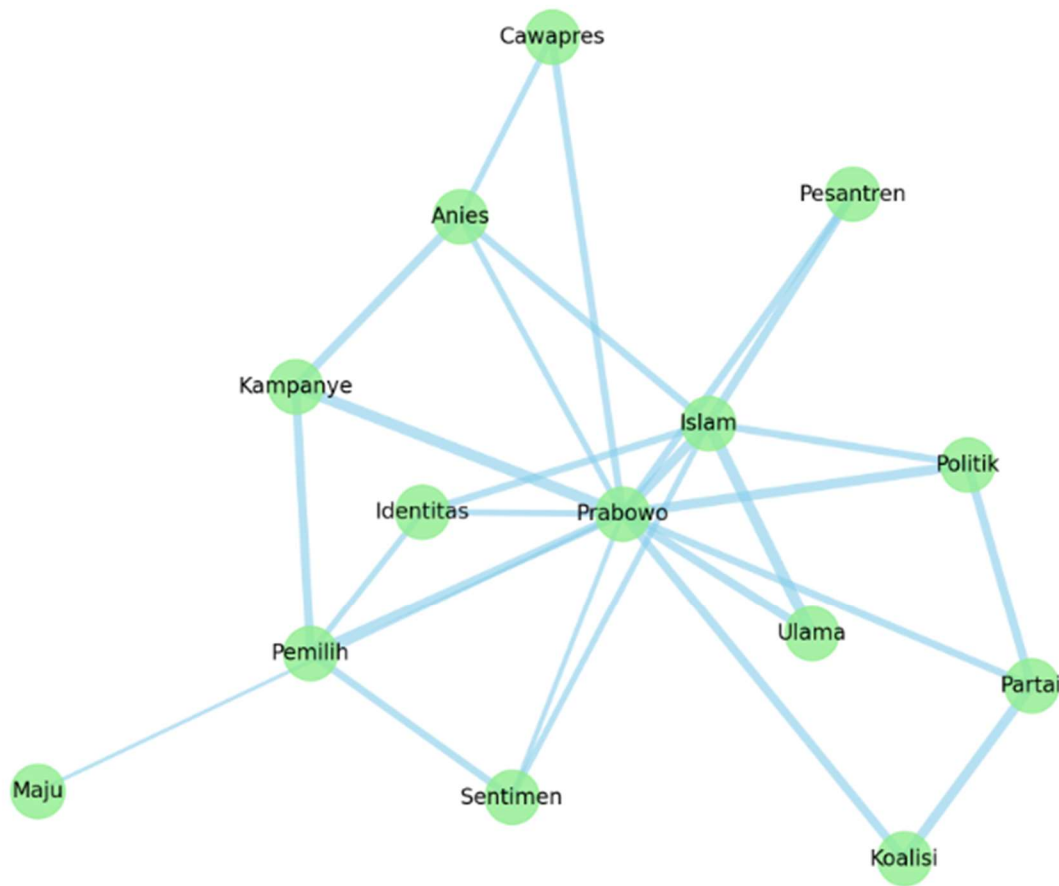
Strategi kampanye dengan menggunakan sentimen agama, tampaknya dirancang untuk menarik simpati pemilih yang merasa terhubung melalui identitas agama mereka. Dalam korpus, munculnya kata seperti "sentimen" dan "identitas" menunjukkan bahwa kampanye tidak hanya menawarkan program atau visi pembangunan, tetapi juga memainkan narasi identitas keagamaan. Hal ini tampak dalam retorika yang membangun kesamaan nilai dan keyakinan, yang berfungsi untuk memperkuat ikatan emosional antara kandidat dan pemilih. Identitas agama dijadikan landasan narasi kampanye yang berupaya menciptakan kesan bahwa pemilih dan kandidat memiliki tujuan bersama.

Selain itu, partai dan koalisi politik memiliki peran penting dalam memobilisasi dukungan berbasis agama. Partai-partai politik menyadari bahwa dalam konteks Jawa Barat, keterikatan pada agama dapat memengaruhi pilihan pemilih. Dengan membentuk koalisi strategis yang didukung oleh kelompok agama atau tokoh ulama, partai dapat mengkonsolidasikan suara di tingkat daerah. Koalisi ini seringkali menonjolkan kesamaan agama atau kepentingan yang berhubungan dengan isu agama untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat di mata pemilih.

Sebaran Kolokasi

Dari 15 daftar kata frekuentif yang muncul pada data korpus, selanjutnya peneliti mencoba melihat kolokasi keterkaitan antara kata-kata tersebut untuk mengetahui wacana komprehensif yang ditampilkan oleh media massa dan warganet di media sosial. Hal ini dilakukan dengan melihat hubungan antarkata dan seberapa sering kata tersebut terhubung. Grafis koneksi kolokasinya adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Grafis Koneksi Kolokasi



Grafis di atas menunjukkan koneksi kolokasi antara kata-kata kunci terkait politisasi agama dalam Pilpres 2024. Setiap garis menggambarkan hubungan antara kata-kata seperti "Prabowo," "Islam," "Pemilih," "Kampanye," "Ulama," dan lainnya. Ketebalan garis menunjukkan kekuatan hubungan atau frekuensi kolokasi: semakin tebal, semakin kuat koneksinya. Kata-kata yang muncul pada media, secara tidak langsung mampu mempengaruhi psikologis pemilih dalam menentukan hak suaranya di pemilihan presiden 2024.

Grafis ini memperlihatkan bahwa kata-kata seperti "Prabowo" memiliki hubungan kuat dengan "Islam," "Kampanye," dan "Koalisi," yang mengindikasikan asosiasi yang sering muncul dalam korpus terkait. Hubungan antarkata kunci seperti "Islam - Ulama" dan "Partai - Koalisi" juga muncul signifikan, mencerminkan tema-tema identitas agama dan politik yang berperan dalam kampanye serta strategi aliansi politik.

Dinamika Agama dan Politik

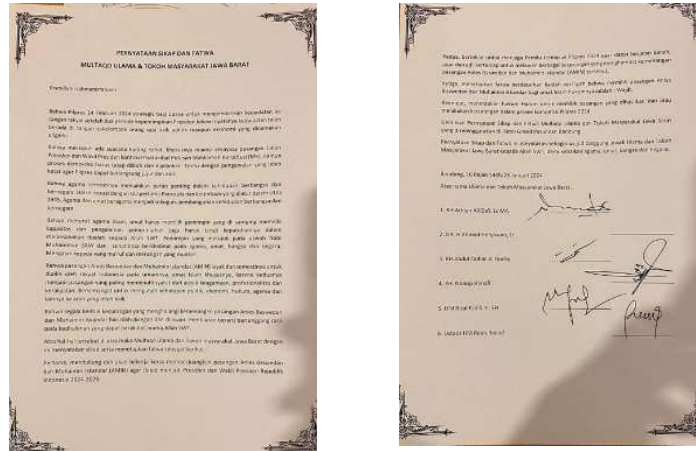
Masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan juga ras menjadi daya tarik yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan pada sila ke tiga sebagai nilai fundamental yakni **p**Persatuan Indonesia, di mana sila ini mengandung makna bahwa seluruh penduduk Indonesia harus bersatu padu tanpa membedakan asal-usul latar belakangnya. Sejalan dengan ini, praktik politik Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2024 nyatanya tidak benar-benar menerapkan Pancasila

sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di mana pada pemilihan presiden tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat, sekelompok agama yang mengatasnamakan Forum Lembaga Dakwah dan Ormas Islam Jawa Barat, yang di dalamnya tergabung dari ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat dengan jelas menyatakan untuk mendukung pasangan calon Anies Baswedan dan mengajak umat Islam mewajibkan untuk memilih. Anggapan ini, di sisi lain bisa saja dibenturkan dari makna demokrasi yang bebas berpendapat dan memilih.

Pada dasarnya agama menjadi panutan dalam mengatur kehidupan manusia yang memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua agama mengajarkan kebaikan, kasih sayang antas sesama, berbuat jujur adil dan toleran. Pada kehidupan sosial agama dijadikan dasar dalam menjalankan kehidupan, tentu hal ini akan menimbulkan perdamaian yang sangat indah. Begitu juga dengan politik hadir di tengah masyarakat sebagai proses perwujudan dalam pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Peran politik dalam sebuah negara merupakan kegiatan yang bersifat mengatur seluruh aktivitas sosial, ekonomi berdasarkan kondisi lingkungan yang ada dengan tujuan mencapai keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara harfiah agama dan politik mempunyai kesamaan dalam kebaikan ditatan masyarakat. Sejalan dalam kegiatan berpolitik, agama menjadi dasar yang cukup kuat untuk membentuk suatu keputusan yang tepat, karena dalam agama mengutamakan hal-hal kebaikan bagi pemeluknya.

Akan tetapi, agama dan politik di Indonesia pada momentum pemilu seakan merubah makna dari kedua unsur tersebut. Pemilihan presiden 2024 merupakan satu dari sekian pemilu yang ada di Indonesia yang memanfaatkan agama dijadikan alat politik untuk mendapatkan suara oleh kelompok tertentu. Agama dipolitisasi karena sebagai keyakinan masyarakat yang memiliki banyak pengikut. Tidak lain harapan dari politisasi agama yakni mampu membawa pengikutnya untuk mendukung pasangan calon tertentu. Politisasi agama ini hanya sedikit mencari pemimpin sesuai dengan prinsip ajaran agama, selain itu terdapat kepentingan-kepentingan politik dan kelompok yang ikut dalam momentum pemilihan presiden. Cacatnya pemilu yang diwarnai politisasi agama menurunkan elektabilitas demokrasi yang sesungguhnya. Tidak hanya dari kelompok kepentingan dan masyarakat yang memainkan peran politisasi agama, melainkan dari perspektif lain juga kurangnya penegakan hukum dalam proses pemilu yang menyebabkan adanya unsur politisasi agama.

Politisasi agama di pemilihan presiden 2024 menjadi sorotan publik saat pernyataan sikap dan fatwa dukungan terhadap calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh sekelompok Ulama dan Tokoh Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Secara tidak langsung, fatwa tersebut merupakan media dalam memobilisasi massa dari kalangan umat muslim sebagai umat mayoritas di Indonesia terlebih di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1. Surat Pernyataan Sikap dan Fatwa Multaqa Ulama & Tokoh Masyarakat Jawa Barat
Sumber : Instagram @berbagisemangat (2024)

Melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Multaqa Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Barat sesuai Gambar 1, bahwa fatwa tersebut, mengajak ummat Islam untuk mendukung dan memilih pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Adanya fatwa yang dikeluarkan oleh ulama tersebut, dominan kepada satu pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024 menjadi viral di media sosial dan mendapatkan berbagai macam respon dari berbagai kalangan. Respon yang diberikan masyarakat juga sangat beragam, ada yang setuju dengan fatwa tersebut, karena ulama sebagai sosok yang mahsyur dan juga sebagai bentuk taqdim seorang muslim pada kyai. Namun di sisi lain, fatwa tersebut juga menuai respons protes bagi sebagian orang Islam yang membawa unsur agama hanya untuk kepentingan politik.

Di Indonesia, agama Islam menjadi agama mayoritas. Sebanyak 245.973.915 Jiwa merupakan penduduk Indonesia beragama Islam. Secara perhitungan teori, jika seluruh ummat Islam Indonesia mendukung pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bisa dipastikan suara mutlak akan diperolehnya. Namun pada pembahasan ini, bukan tentang menang atau tidaknya pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, melainkan bagaimana peran agama dipolitisasi untuk strategi kemenangan di Pemilihan Presdien 2024. Pada momentum pemilihan presiden, banyak timbul persoalan bukan hanya antaragama, melainkan orang yang agamanya sama sering terjadi kegaduhan atas dasar perbedaan pilihan dalam mendukung pasangan calon presiden. Terlebih fokus dari persoalan ini yakni adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Forum Lembaga Dakwah dan Ormas Islam Jawa Barat.

Adanya politisasi agama menjadi pemicu rusaknya hubungan antargolongan maupun sesama golongan, terlebih bagi masyarakat sipil yang minim pendidikan politik. Di kalangan masyarakat perbedaan pilihan sudah lumrah terjadi, ada yang melihat dari *track record* pasangan calon presiden, program kerja serta visi dan misi. Adanya dukungan ulama atau tokoh masyarakat pada calon presiden tertentu juga menambah nilai potensial dukungan dari masyarakat. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti pilihan dari sebagian ulama tersebut, hal ini karena prinsip dasar yang meyakini bahwa politik dan agama tidak boleh disatukan, karena akan merusak nilai dari keduanya. Akhirnya terdapat masyarakat yang berkelahi seperti adu mulut, tidak saling tegur sapa, dan lainnya karena perbedaan persepsi tersebut.

Sebagai negara demokrasi yang memiliki pluralitas yang sangat tinggi, adanya politisasi agama dapat melemahkan demokrasi dan memberikan dampak yang kurang baik. Tulisan mengenai politik agama telah banyak dibahas dalam ilmu-ilmu sosial dalam beberapa dekade terakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini menegaskan dari segi peran pemuka agama yang memanfaatkan kekuasaan sebagai pengaruh terbesar, di mana agama dipolitisasi yang ditujukan secara terbuka untuk pemenangan pada satu kandidat di pemilihan presiden tahun 2024.

Islam Dalam Kepemiluan

Secara keilmuan, jika agama dijadikan dasar dalam berpolitik sebenarnya tidak menjadi masalah. Hanya saja yang perlu diperhatikan ialah bagaimana posisi agama sebagai acuan yang tidak dimanfaatkan dari sudut pandang yang lain. Terlebih pada kasus pemilihan presiden 2024 ini agama Islam yang menjadi sorotan publik. Hakikatnya, ajaran agama Islam memberikan kemudahan bagi ummatnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun sosial lainnya. Sebagai contoh, dalam melakukan ibadah sholat lima waktu, Islam memberikan kemudahan bagi ummatnya yang sedang sakit untuk tetap melakukan ibadah sholat sesuai dengan kondisi yang dialami.

Jika melihat kasus di pemilihan presiden 2024 di Provinsi Jawa Barat, sesuai pada Gambar 1., bahwa agama Islam seolah-olah menjadi alat dalam melakukan kampanye, secara jelas fatwa tersebut menyuarakan dukungan kepada pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta mewajibkan bagi ummat Islam untuk mendukung. Berbagai spekulasi di kalangan masyarakat bermunculan tujuan dari motif ini. Hasil penelitian mengarah adanya motif menginginkan calon presiden yang berbasis secara syariat Islam. yang merupakan gerakan dalam menyuarakan persoalan-persoalan ummat Islam bagi mereka pada sikap pemerintah yang terlalu memarginalkan masyarakat. Persepsi seperti ini tidak sepenuhnya dialami oleh masyarakat Islam yang lain, artinya kepentingan ini disadari ada campur tangan politik dengan memanfaatkan agama sebagai perlawanan. Jika ditelaah lebih dalam, kasus ini merupakan seni dari berpolitik, setiap pendukung atau elit politik memerankan kepentingan tersendiri untuk mencapai apa yang diinginkannya. Dalam setiap konstestasi pemilu, politik memiliki isu menarik yang mampu memberikan perlawanan yang semakin kuat, hal ini semata-mata sebagai bentuk untuk mendapatkan kekuasaan.

Fatwa ini disiarkan secara pers yang dihadiri oleh sekelompok multaqa dan pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Sutrisno & Pasha, 2024), artinya pasangan calon tersebut mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok ini menggunakan agama dalam mendeklarasikan dukungan kepada publik. Haus kekuasaan juga menjadi bagian yang tak terelakkan, dalam pemilu. Sebagai aktor politik, terlebih maju pada pemilihan presiden sudah sepatutnya mengetahui yang dilakukan oleh sekelompok bisa menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat bawah. Politisasi agama yang dijadikan nilai jual kerap diterima langsung oleh pasangan calon Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Melihat kasus seperti ini, peran pendidikan politik bagi semua kalangan juga diperlukan, tidak hanya diberikan kepada masyarakat sipil, melainkan para elit politik, dan anggota partai politik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa agama dengan politik bisa sejalan asal agama tidak dijadikan sebagai alat dalam politik. Nilai prinsip dasar demokrasi jauh lebih terhormat jika sekelompok ulama dan tokoh masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang mengatasmakan Forum Lembaga Dakwah dan Ormas Islam mampu memberikan kedamaian dalam berpolitik. Dukungan melalui fatwa tersebut tidak perlu menunjuk secara langsung kandidat yang diusungnya. Jika memang hadirnya ulama dan tokoh masyarakat di Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk perubahan, maka politik Islam mampu diterima di tengah masyarakat yang pluralis dengan menyoroti isu-isu prioritas yang

relevan dengan kehidupan masyarakat yang berdampak secara nyata seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya yang selama ini menjadi kesulitan masyarakat.

Sejauh ini belum ada produk hukum yang mengatur larangan berpolitik dalam menggunakan agama dan identitas. Tidak adanya larangan ini memberikan ruang gerak bagi para elit politik memainkan perannya ketika pemilu. Agama yang di bawa dalam kasus pemilihan presiden 2024 di Provinsi Jawa Barat cukup menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam, masyarakat memiliki persepsi tersendiri dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada pemilihan presiden 2024. Perlunya kebijakan yang mengatur kegiatan dalam berpolitik baik itu elit politik, partai politik ataupun masyarakat secara umum pada saat pemilu tanpa mengandung unsur agama, identitas baik suku maupun budaya yang mampu memecah belah bangsa dan negara. Peraturan ini nantinya sebagai bentuk langkah awal dalam meminimalisir politisasi agama yang kerap terjadi pada saat pemilu.

SIMPULAN

Politisasi agama di pemilihan presiden 2024 terjadi bukan karena tanpa sebab, naiknya kasus ini dan ramai di kalangan masyarakat sebagai bentuk dari keinginan ulama dan tokoh masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Lembaga Dakwah dan Ormas Islam, yang merasa termarginalkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Sehingga perlu, ulama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tersebut memberikan masukan dan arahan kepada umat islam dalam memilih. Namun cara yang disampaikan oleh Forum Lembaga Dakwah dan Ormas Islam menjadi permasalahan tersendiri karena menjadikan agama sebagai alat politik dengan mewajibkan umat islam untuk memilih kandidat tertentu yang telah ditentukan. Agama dijadikan sebagai dasar memilih dalam politik tidak menjadi masalah, prinsip-prinsip dalam memilih dari perspektif agama menjadi dasar bagi masyarakat dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 juga perlu, namun tidak langsung tertuju pada kandidat tertentu sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh sekelompok Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Barat tersebut, karena ini mampu merusak hak demokrasi dan juga memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Berita secara daring juga memberikan ruang bagi pemilih dalam melihat figur politik. Kata Prabowo dan Anies dalam korpus ini menunjukkan bahwa masyarakat fokus pada nilai dan identitas tertentu, termasuk agama. Ke depan, pelaksanaan politisasi agama pada praktik politik tidak lagi menjadi kasus yang berulang, dengan adanya penelitian ini diharapkan kelompok, elit politik, partai politik lebih bisa memahami bahwa politisasi agama bukanlah salah satu cara yang terbaik dalam mendapatkan suara, apalagi masyarakat diharapkan lebih selektif dalam mencari informasi mengenai pemilu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Wodak, R. (2001). What CDA is about - a summary of its history, important concepts and its developments. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis*. 1–13. London: SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/-9780857028020.n1>
- Altnordu, A., 2010. The Politicization of Religion: Political Catholicism and Political Islam in Comparative Perspective. *Polit. Soc.* 38, 517–551. <https://doi.org/10.1177/0032329210381238>
- Barokah, F., Kurniawan, R.C., 2024. PERILAKU POLITIK SANTRI PADA PILKADA LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020: STUDI PADA PESANTREN TRADISONAL DAN PESANTREN MODERN. *JWP J. Wacana Polit.* 9, 21–30. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i1.36326>

- Brilliant, C., Tawakkal, G.T.I., Rohman, A.Z.F., 2022. Kelembagaan Sosiologis Terkait Ketiadaan Politikus Perempuan Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Trenggalek. *Sospol* 8, 183–196. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23304>
- Djupe, P.A., Neiheisel, J.R., 2022. The Religious Communication Approach and Political Behavior. *Polit. Psychol.* 43, 165–194. <https://doi.org/10.1111/pops.12848>
- Hamid, A., Sanusi, A., Lutfi, A., Mubarak, M.S., Habibi5, D.F., 2023. Refleksi Pemilu 2024 terhadap Politisasi Agama di Media Sosial Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *Gunung Djati Conf. Ser.* 21, 1–12.
- Istianah, R., Saehudin, 2023. POLITIK IDENTITAS DAN PERILAKU POLITIK KIAI DI KOTA SUKABUMI MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024. *Elect. Gov. J. Tata Kelola Pemilu Indones.* 4, 233–250. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.876>
- Kurniawan, B., 2018. Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *J. Sociol. Agama* 12, 133–154. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>
- Kusumastuti, A., Khoiron, A.M., 2019. Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Leah Alexis Laloan, 2024. Ratusan Ulama Jabar Keluarkan Fatwa Dukung Pasangan AMIN [WWW Document]. URL <https://www.metrotvnews.com/play/bmRCew1D-ratusan-ulama-jabar-keluarkan-fatwa-dukung-pasangan-amin> (accessed 9.24.24).
- Maarif, A.S., 2012. POLITIK IDENTITAS DAN MASA DEPAN PLURALISME KITA.
- Masykuri Abdullah, 2018. Membendung Politisasi Agama [WWW Document]. URL <https://graduate.uinjkt.ac.id/id/membendung-politisasi-agama> (accessed 9.23.24).
- Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldaña, J., 2014. *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*, Edition 3. ed. Sage, Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC.
- Nasution, A.F., 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative, Bandung.
- Novrizaldi, 2022. Cegah Politisasi Agama, Penguatan Modernisasi Beragama Diperlukan Jelang Pemilu 2024 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [WWW Document]. URL <https://www.kemenkopmk.go.id/cegah-politisasi-agama-penguatan-modernisasi-beragama-diperlukan-jelang-pemilu-2024> (accessed 9.24.24).
- Nurhayati, I., Agustina, L., 2020. Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya. *Akademika* 14. <https://doi.org/10.30736/adk.v14i01.184>
- Pathomchaiwat, L. (2021, July). A Corpus-Driven Analysis for Political Discourse Analysis. The 13th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University.
- Qurtuby, S.A., 2018. Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. *MAARIF* 13, 43–54. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>
- Ruslan, I., 2014. PARADIGMA POLITISASI AGAMA: UPAYA REPOSISI AGAMA DALAM WILAYAH PUBLIK. *MADANIA J. Kaji. Keislam.* 18, 161–172. <https://doi.org/10.29300/madania.v18i2.15>
- [Sutrisno, D. & Pasha, Y. 2024. Sejumlah Toko di Jabar Keluarkan Fatwa 'Wajib' Pilih Anies Baswedan. URL \[Sejumlah Tokoh di Jabar Keluarkan Fatwa 'Wajib' Pilih Anies\]\(https://doi.org/10.29300/madania.v18i2.15\)](https://doi.org/10.29300/madania.v18i2.15)
- Uswah Sahal, 2024. Dosen UM Surabaya Ingatkan Soal Politisasi Agama Jelang Pilpres 2024 [WWW Document]. UMSurabaya. URL <https://www.um-surabaya.ac.id/article/dosen-um-surabaya-ingatkan-soal-politisasi-agama-jelang-pilpres-2024> (accessed 9.24.24).
- Williamson, S., Yildirim, A.K., Grewal, S., Kuenkler, M., 2023. Preaching Politics: How Politicization Undermines Religious Authority in the Middle East. *Br. J. Polit. Sci.* 53, 555–574. <https://doi.org/10.1017/S000712342200028X>

Zetterholm, M. (2010). A linguistic corpus-driven approach to American domestic politics.